**STUDI TENTANG OTONOMI DESA**

**DI DESA KAYA BATU KECAMATAN MUARA MUNTAI**

**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**Rapika Pebriana**

Jamiah, S.Sos, M.Si dan H. Marsuq, S.Sos, M.Si

1Administrasi Negara, Fisipol, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia.

2Dosen Fisipol, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 75124, Indonesia.

**ABSTRAK**

**RAFIKA PEBRIANA**, Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menggambarkan bagaimana Otonomi Desa di Desa Kayu Baru Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan analisa deskripsi. Untuk memperoleh data penelitian, khususnya dengan teknik wawancara peneliti menggunakan metode Purposive Sampling, kemudian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti melakukan triangulasi sumber yang memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan pengecekan ulang serta dapat melengkapi informasi dari berbagai sumber.

Dari hasil penelitian maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Otonomi Desa di Desa Kayu Baru Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari empat fokus penelitian hanya ada satu fokus yang menurut peneliti memuaskan dan mencerminkan kemandirian desa tersebut yaitu pada pelaksanaan pemilihan pemimpin bagi desanya. Dimana mulai dari peraturan mengenai kepala desa hingga proses pemilihan kepala desa semuanya berjalan dengan baik, demokrasi sesuai dengan hati nurani masyarakat tanpa adanya paksaan. Sedangkan pada fokus penelitian lainnya seperti dalam menyelenggarakan pemerintah desa, merencanakan pembangunan dan menggalang segenap potensi yang ada bagi kemandirian desa dinilai tidak memuaskan.

Dari penelitian tersebut dapat diketahui pelayanan desa kepada masyarakat tidak optimal sebab masih banyak keluhan-keluhan warga yang belum dapat dipenuhi seperti pelayanan dalam pengetikan yang berhubungan dengan administrasi desa yang masih lambat dan bertele-tele. Dalam pelaksanaan pembangunan khususnya dalam proses penyusunan APBDes desa masih bergantung pada bantuan yang diberikan dari pihak Kabupaten dan swasta. Tetapi hal yang paling memperhatinkan adalah pemerintah desa tidak mempunyai sumber-sumber pendapatan desa dan tidak mempunyai satupun peraturan mengenai iuran bagi perusahaan yang ada didesa untuk dijadikan sumber pendapatan asli desa.

***Kata Kunci: Otonomi Desa***

1. **PENDAHULUAN**

Proses reformasi politik dan pergantian pemerintahan yang terjadi pada tahun 1998 mengantarkan desa memasuki babak baru ( otonomi ) dan demokrasi lokal. Hal ini terlihat dari lahirnya UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang didalamnya juga mengatur tentang pemerintahan desa, yang kemudian direvisi menjadi UU No.32 tahun 2004. dan direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Desa yang pada saat ini menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten sehingga desa berhak untuk berbicara atas kepentingan sendiri sesuai dengan kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentu saja memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan pembangunan didesa, terlebih jika daerah atau desa tersebut memiliki potensi yang sangat menunjang untuk melakukan usaha pembangunan. Dalam rangka pembangunan yang merata khususnya didesa diperlukan peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan. Pembangunan tidak semata-mata menjadi tugas pemerintah saja melainkan juga menjadi tugas dan tanggung jawab dari masyarakat bahkan keberhasilan pembangunan tergantung dari tingkat partisipasi masyarakat baik secara fisik maupun moril dapat dihhindari, yang pada gilirannya akan terbentuk desa-desa yang mampu melayani dan mengayomi masyarakat serta dapat melaksanakan pembangunan berdasarkan swadaya dan swakarsa masyarakat itu sendiri. Apalagi dengan semakin pesatnya pembangunan yang dilaksanakan sekarang ini, terutama pembangunan pedesaan maka kemampuan dan kemandirian pemerintah desa mutlak diperlukan. Hal ini telah memberikan peluang dalam mengarahkan pembangunan desa sesuai tuntutan masyarakat, terlebih jika daerah atau desa tersebut memiliki potensi yang menunjang untuk dilakukan usaha pembangunan. Seperti desa yang akan penulis jadikan sebagai obyek penelitian, yaitu Desa Kayu Batu Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat dikatakan memiliki potensi yang cukup besar Khususnya potensi sumber daya alamnya.

Salah satu bentuk perwujudan pelaksanaan otonomi desa yang mulai berjalan secara bertahap adalah keleluasaan desa atau masyarakat dalam memilih pemimpinya sendiri. Namun disisi lain masih terdapat beberapa masalah yang harus dicari jalan keluarnya diantaranya masih rendahnyakemampuan desa dalam menghasilkan keputusan desa atau membuat peraturan desa. Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik meneliti dengan judul: “Studi Tentang Pelaksanan Otonomi Desa di Desa Kayu Batu Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara.”

1. **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas penulis dapat merumuskan masalah dalam dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah pelaksanaan otonomi desa di Desa Kayu Batu Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara?

1. **METODE PENELITIAN**

Sugiyono (2001:6) mengemukakan bahwa : “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain” sedangkan Mely G. Tan yang dikutip oleh Soejono (2002:22) mengemukakan bahwa : “Penelitian yang bersifat deskriptif, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat”.

Berdasarkan tujuan penelitian dan pendapat diatas, maka jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian bersifat deskriptif. Berdasarkan jenis penelitian ini maka penulis berusaha menggambarkan dan menjabarkan variabel penelitian yaitu pelaksanaan otonomi desa.

Sebelum penulis menjelaskan lebih jauh tentang fokus yang diteliti. Akan dijelaskan terlebih apa yang dimaksud dengan fokus penelitian menurut **Sugiyono (2005:32)** adalah batasan masalah dalam penelitian yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum.

Dalam penelitian kualitatif penentu dalam penelitian lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial lapangan. Oleh karena itu maka fokus penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Berdasarkan uraian penjelasan studi kepustakaan tersebut diatas, maka penulis kemukakan indikator-indikator dari masing-masing variabel yang akan diamati sebagai berikut :

1. Memilih pemimpin, yang berfokus kepada :
   1. Peraturan mengenai pemilihan kepala desa.
   2. Peroses pemilihan kepala desa.
2. Kemampuan desa dalam menjalankan fungsinya, yang berfokus pada:
   1. Kemampuan desa dalam melayani masyarakat
3. Pembangunan desa, yang befokus pada :
   1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
   2. Proses penyusunan APBDes
4. Kemampuan keuangan yang berfokus pada :
   1. Sumber-sumber pendapatan asli desa.

Teknik mengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut :

1. Penggunaan perpustakaan atau penelitian kepustakaan

Penggunaan perpustakaan sebagai data sekunder, yaitu penulis mengumpulkan dan menelaah literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dihadapi sebagai pedoman dalam menentukan teori pendukung.

1. Penelitian lapangan, dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) cara yaitu :
2. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan atau pengindraan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku. Dari objek ini penulis harapkan dapat melihat kenyataan yang ada, kegiatan-kegiatan dan hasilnya.
3. Wawancara, cara ini untuk mendapatkan data-data dengan orang-orang yang mengetahui tentang pelaksanaan otonomi desa.
4. Telaah dokumentasi, yang dimaksudkan untuk mengambil sebuah data dengan cara membaca dan menyimak terhadap berkas-berkas laporan kepala desa, monografi desa, peraturan-peraturan desa dan dokumen-dukumen lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1997:16), mengatakan bahwa analisa data kualitatif terdiri dari empat komponen yaitu sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Yaitu data pertama atau data mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian.

1. Data Reduction atau Penyederhanaan Data

Reduction data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan dengan membuat abstraksi. Mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian kedalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan tahap analisa data yang mempertajam atau memusatkan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan.

1. Data Display atau Penyajian Data

Penyajian data adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga diperlukan kemungkinan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

1. Conclution Drawing atau Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah merupakan langkah ketiga meliputi makna yang telah disederhanakan dan disajikan dalam penyajian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi yang memungkinkan dipredeksikan hubungan sebab-akibat melalui hukum-hukum empiris.

**IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

* 1. **Deskripsi Wilayah Penelitian**
     1. **Kondisi Umum**

Desa Kayu Batu merupakan desa yang terletak kurang lebih 12 Km dari Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagian besar penduduk desa tersebut merupakan Pendatang dari luar daerah, hanya sebagian kecilnya adalah penduduk asli. Kondisi alam berbukit dan namun cocok untuk pertanian sehingga tidak heran jika sebagian besar mata pencaharian adalah bertani.

* + 1. **Keadaan Penduduk**

Hampir seluruh penduduk Desa Kayu Batu adalah penduduk pendatang. Jumlah penduduknya saat ini adalah sebanyak 1.726 orang yang tersebar dalam 3 Dusun dan 10 Rukun Tetangga.

* 1. **Hasil Penelitian**

Data-data yang diperoleh tentang deskripsi Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Kayu Batu Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan berupa cerita asli para responden menurut bahasa, pandangan, dan ungkapan mereka. Penyajian data ini yakni dalam bahasa yang tidak formal dalam susunan kalimat sehari-hari dan pilihan kata atau konsep asli responden, cukup rinci serta interprestasi dan evaluasi dari peneliti. Karena itu penulis menyajikan data dari konsep otonomi desa dalam penelitian ini yang dijabarkan pada fokus penelitian sebagai berikut:

* + 1. **Memilih Pemimpin**

Dalam memilih pemimpin bagi desanya, masyarakat Desa Kayu Batu sangat selektif. Dimana dari pengalaman sebelumnya masyarakat memilih pemimpin hanya dengan melihat figur atau karisma seseorang, tanpa disertai visi dan misi yang jelas bagi desanya. Agar tidak terulang lagi maka dalam pemilihan kali ini masyarakat Desa Kayu Batu belajar dari pengalaman akan pentingnya mencari seorang pemimpin yang tidak hanya dilihat dari figur atau karisma semata tetapi benar-benar dinilai dari pemimpin yang memiliki tujuan yang jelas, mampu memimpin dan mengatur urusan-urusan desanya serta konsisten terhadap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan.

* + 1. **Kemampuan Desa Dalam Menjalankan Fungsinya**
    2. ***Kemampuan Desa Malam Melayani Masyarakat***

Kemampuan Desa Kayu Batu dalam melayani masyarakat di desanya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat diusahakan berdasarkan asal-usul dan nilai-nilai sosial yang ada dimasyarakat. Dalam usaha melayani masyarakat tersebut Kayu Batu telah berusaha mulai dari menggunakan teknologi yang modern seperti komputer di kantor desa, agar pelayanan yang dilakukan dapat berjalan efektif dan efisien. Begitu juga dalam penempatan staf desa dianggap mampu dan telah berpengalaman dalam bidangnya. Terbukti dari struktur pemerintah yang ada sekarang bahwa beberapa staf adalah staf yang mengabdi di periode sebelumnya.

* 1. **Pembahasan**

Didalam Pembahasan ini penulis akan kemukakan tentang pokok-pokok dalam penelitian ini dan juga menganalisisnya berdasarkan hasil penelitian. berikut uraian yang penulis sajikan kedalam sub pokok bahasan sebagai berikut :

* + 1. *Kemampuan Desa Dalam Memilih Pemimpinnya Sendiri*

Demi terwujudnya kemampuan masyarakat desa dalam memilih pemimpinya sendiri atau dengan kata lain untuk pemberdayaan politik, pemerintah desa diberi keleluasaan menentukan calon pemimpinnya menurut kriteria yang dapat mereka nilai dan pahami. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang berperan sebagai penggerak organisasi. Adapun ciri-ciri pemimpin yang dibutuhkan antara lain adalah pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas, kemampuan berorganisasi, dan dapat menumbuhkan motifasi anggotanya, berdasarkan pada pertanggung jawaban publik, demokratis dalam pengambilan keputusan, memiliki kemampuan manajemen serta mampu menggalang kerja sama antar organisasi tingkat desa.

* + 1. *Kemampuan Desa Dalam Menjalankan Fungsinya*

Dukungan oleh masyarakat terhadap suatu rencana usaha pembangunan desa sangat berpengaruh terhadap realisasi rencana tersebut. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan menuntut dukungan masyarakat maka pelayanan masyarakat perlu ditingkatkan kualitasnya. Berhasilnya pelaksanaan pembangunan tidak hanya bisa diukur dengan keberhasilan fisik saja akan tetapi juga berkaitan dengan hal-hal yang bersifat non fisik. Diantaranya adalah kepuasan batin anggota masyarakatnya terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintahan desa. Aparatur pemeritah desa sebagai abdi dari masyarakat harus senantiasa berusaha memberikan pelayanan sebaik-baiknya terhadap masyarakat dalam berbagai urusan dan kepentingan. Misalnya dalam mengurus surat-surat tertentu, petugas harus mampu menyelesaikan dengan cepat dan tepat waktu serta tidak berbelit-belit. Dengan cara demikian masyarakat akan merasa puas dengan pelayanan tersebut yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakatnya untuk terlibat aktif dalam setiap gerak pembangunan.

* + 1. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*

Permasalahan mendasar dalam pembangunan desa adalah partisipasi masyarakat. Dengan semakin meningkatnya keinginan masyarakat untuk terlibat dalam usaha pembangunan di desa, menunjukan adanya kesadaran masyarakat bahwa usaha tersebut adalah untuk kepentingan bersama, pentingnya keterlibatan masyarakat baik berupa pikiran, tenaga serta materi akan sangat membantu keberhasilan dari peroses pembangunan yang berkesinambungan.

* + 1. *Kemampuan Keuangan*

Salah satu wujud nyata dari otonomi, masyarakat desa adalah kemampuan desa dalam menggalang potensi yang ada bagi penigkatan kemandirian desa. Perwujudan otonomi masyarakat desa bisa dipandang sebagai peroses penigkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi menuju kehidupan masyarakat desa yang diatur dan digerakan oleh masyarakat dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.

* 1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Otonomi desa di Desa Kayu Batu Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dikatakan belum berjalan secara optimal. Dari empat fokus penelitian yang penulis ambil hanya ada satu fokus penelitian yang penulis nilai mencerminkan kemandirian desa tersebut. Fokus penelitian tersebut hanya pada pelaksanaan pemilihan pemimpin bagi desanya, hingga proses pelaksanaan pemilihan kepala desa semuanya berjalan dengan baik dan masyarakat Desa Kayu Batu memilih secara demokrasi sesuai dengan hati nurani, tanpa ada paksaan.
2. Pelayanan aparatur pemerintah desa kepada masyarakat dibidang administrasi masih belum optimal khususnya pada pelayanan dalam membuat surat-menyurat ataupun surat pengantar dan pembuatan KTP yang dinilai tidak efektif dan efisien karena sangat lamban dan harus melalui banyak prosedur yang berbelit-belit dan membutuhkan biaya yang besar.
3. Dalam peroses penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ( APBDes ) di Desa Kayu Batu Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara melibatkan komponen yang ada didalam masyarakat dan berjalan secara demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan juga baik, hanya saja masih bertumpu pada besarnya bantuan yang ada atau yang akan diterima dari pihak kabupaten maupun pihak swasta sehingga program pembangunan yang akan dilakukan masih sanga terbatas sisesuaikan dengan dana yang diperoleh.
4. Pemerintah desa belum pernah membuat peraturan desa, sebab mereka menganggap bahwa peraturan-peraturan yang menyangkut kehidupan masyarakat sudah banyak diatur dalam keputusan-keputusan lembaga adat yang sampai saat ini masih berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat desa. Hal tersebut dapat menimbulkan kurangnya legalitas terhadap tindakan-tindakan aparatur desa dalam pelaksanaan pemerintahan.
   1. **Saran**
5. Pihak desa hendaknya dapat meningkatakan pelayanaan kepada masyarakat terutama dalam proses pengetikan dan surat-menyurat, seperti pengadaan tenaga teknis komputer atau pun memberikan pelatihan kepada aparat desa agar dapat menggunakan fasilitas komputer yang ada demi tercapainya keinerja yang efektif dan efisien.
6. Pihak desa juga harus lebih tangganp terhadap segala keluhan yang ada dimasyarakat agar dapat segera dicari solusi yang tepat seperti dalam hal pembuatan KTP yang sebisa mungkin hanya dikerjakan oleh pihak desa tanpa harus membebankan kepada masyarakat secara langsung ke kecamatan yang sebenarnya telah dirasakan sangat menyita waktu dan biaya yang besar.
7. Dalam menjalankan program-program desa, prioritaskan penyediaan sarana dan prasarana yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat seperti sarana sumber air bersih dan kesehatan.
8. Peraturan desa hendaknya mempunyai peraturan dan keputusan desa tidak hanya mengandalkan Perda Kabupaten Kutai Kartanegara ataupun peraturan lembaga adat yang berlaku agar pemerintah desa lebih mempunyai legitimasi hukum yang mandiri dan rinci sesuai dengan keadaan. Salah satu contoh adalah perlu adanya peraturan desa dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli desa agar pihak desa dapat mencari dan menggali bentuk-bentuk baru sumber-sumber tersebut demi menunjang usaha pembangunan didesa pimping sehingga tidak selalu bertumpu pada bantuan dari kabupaten atau pihak swasta.
9. Pemerintah desa dan tokoh-tokoh lembaga adat hendaknya dapat meninjau kembali tentang kebijakan yang dibuat dalam peraturan desa yang berlaku. Dimana dalam peraturan tersebut masih terdapat kerancuan dan sanksi yang diberikaan kepada pelanggar hukum dinilai sangat ringan, tidak sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku-Buku:**

Bachtiar Effendi, *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*, Cetakan pertama, PT. Uhaido dan Offset, 2002

B. N. Marbun, *Proses Pembangunan Desa Menyongsong Tahun 2000,* Erlangga, Jakarta, 1984

B. Simandjuntak dan I.L. Pasaribu, *Pendidikan dan pembangunan Masyarakat Desa,* Tarsito, Bandung, 2001

CST. Kansil, *Desa Kita Dalam Peraturan dan Tata Pemerintahan Desa,* Ghalia, Jakarta,2002

HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh,*PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

H. Hartono dan Arnicun Azis, *,MKDU Ilmu Sosial Dasar*, Cetakan Ketiga, Bumi Aksara, Jakrata, 2000

Kartini Kartono,  *Pengantar Metodologi Riset Sosial,* Cetakan Kedua, Alumni Bandung, 2003

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat,* Cetakan Keempat belas, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2002

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Cetakan Kedua, LP3ES, Jakarta, 2000

Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

R. Agustoha Kuswata, *Manajemen Pembangunan Desa,* Grafindo Utama. Jakarta,2001

Soejono dan Abdulrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan,* PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000

Soejono hoemardani, *Renungan Tentang Pembangunan,* Proklamasi, Jakarta, 2002

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi,* Cetakan Kedelapan, CV. Alfa Beta, Bandung, 2001

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1,* cetakan Kedelapan puluh delapan, Andi Yogyakarta, 2003.

-----------------, *Metodologi Reserach 2*, Cetakan kedelapan puluh enam, Andi, Yogyakarta, 2001

Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintah Desa*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.

-----------------------, *Metodologi Penelitian Pembangunan Desa,* PT. Bina Aksara, Jakarta, 2001

Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah dasar Dan Methode Tekhnik,* Tarsito, Bandung, 2002.

Fakrullah dkk, Konsep Otonomi Desa, Jakarta, Grafindo Utama, 2004

**Peraturan-Peraturan:**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pedoman Umum Pemerintah Desa

Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Desa.

Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala

Desa,